Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Insentif untuk Penggali Kubur Tertahan Dua Bulan

Pemerintah berjanji uang insentif untuk penggali kubur da sopir ambulans akan cair pekan ini.

Inge Klara Safitri

Inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA — Lebih dari seratus petugas lapangan yang menangani jenazah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) belum mendapat insentif selama dua bulan terakhir. Padahal mereka mengandalkan uang insentif itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Petugas lapangan itu adalah sopir ambulans dan penggali makam. Muhammad, penggali kubur di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur, mengatakan uang insentif yang besarnya Rp 1 juta itu biasanya diterima bersamaan dengan gaji bulanan. Tapi, sejak Juni lalu, ia dan sejumlah temannya belum menerima lagi. "Sekarang, ya, jadi sudah mau tiga bulan," kata pria 55 tahun ini, kemarin.

Pria yang memiliki empat anak itu menambahkan, uang insentif dari pemerintah DKI Jakarta sangat berarti bagi keluarganya. Apalagi setelah istri dan anak sulungnya dirumahkan dari pekerjaan mereka sebagai petugas kebersihan gedung, sehingga hanya penghasilannya yang saat ini menjadi gantungan.

Menurut Muhammad, bersama beberapa temannya, mereka sudah menanyakan ihwal uang insentif itu kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Namun pegawai Dinas hanya meminta mereka bersabar. "Dijanjikan secepatnya (cair) terus," ujar dia. "Sedang diproses, katanya."

Seorang penggali kubur berinisial HA juga menyampaikan keluhan serupa. Pencairan insentif yang telat ini membuat mereka kurang bersemangat untuk menggali liang lahad. "Kalau dulu, kami semangat buat lubang cadangan setiap hari untuk jenazah Covid-19," katanya. "Sekarang, *nunggu* saja kabar (jenazah) yang datang," ujarnya kepada *Antara*.

Menurut HA, selama masa pandemi, mereka harus siaga 24 jam secara bergantian, karena jenazah pasien Covid-19 harus segera langsung dimakamkan. Proses pemakamannya pun dilakukan dengan cepat dan seefektif mungkin.

Pemberian insentif itu adalah bagian dari janji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani wabah Covid-19. Pemerintah menilai para pekerja yang menangani jenazah pasien Covid-19 berisiko tinggi tertular wabah. Karena itu, sebaga bentuk dukungan, pemerintah menyiapkan anggaran khusus bagi mereka setiap bulan.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mendesak pemerintah provinsi untuk segera mencairkan insentif buat penggali kubur dan sopir ambulans. "Kalau sampai tidak dibayar, artinya Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota itu tidak punya hati nurani," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta, Gembong Warsono, dua hari lalu.

Menurut Gembong, pemerintah bisa menggunakan pos biaya tidak terduga untuk membayar insentif para pekerja itu. Anggaran itu telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020, sehingga tak ada alasan pemerintah tidak memiliki dana. "Ini soal skala prioritas. Harusnya pekerja itu mendapat penghargaan, kok malah insentifnya belum dibayar," kata dia.

Wakil Ketua DPRD Jakarta, Abdurahman Suhaimi, juga meminta Dinas Pertamanan segera melunasi tunggakan insentif kepada pekerja tersebut. Menurut dia, wajar dalam kondisi pandemi dan darurat ada proses yang terlewat. Namun hak para penggali kubur dan sopir ambulans tak seharusnya disepelekan. Apalagi mereka bekerja dengan risiko tertular virus *corona*. "Hak mereka harus dipenuhi, jangan sampai terlupakan," ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan akan berupaya agar insentif untuk petugas pemakaman dan sopir ambulans bisa cair pekan ini. Apalagi dana tersebut memang sudah disiapkan. "Kami pastikan semuanya diselesaikan segera," ujarnya.

Berdasarkan data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, total petugas lapangan yang belum menerima insentif sejak Juni lalu berjumlah 113 orang. Rinciannya, 48 orang sopir ambulans, 25 orang petugas pemakaman Tegal Alur, dan 40 petugas pemakaman Pondok Ranggon.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, mengatakan telah memproses pencairan insentif tersebut. "Dalam waktu dekat sudah cair," ujar Suzi.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Edi Sumantri, dana yang dibutuhkan untuk insentif petugas pemakaman dan sopir ambulans memang sudah disiapkan. BPKD tinggal menunggu permohonan pencairan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. "Setelah permohonan masuk, satu hari langsung cair," kata Edi.

Edi menjelaskan, dana yang digunakan untuk membayar insentif adalah anggaran yang memang telah dialokasikan untuk penanganan wabah Covid-19 secara umum. Total nilai anggarannya sebanyak Rp 5,02 triliun. "Yang mengelola memang BPKD selaku Bendahara Umum Daerah," katanya.

● INGE KLARA SAFITRI